

SEJARAH BANK INDONESIA : KELEMBAGAAN  
Periode 1959-1966

---



Cakupan :

	<b>Halaman</b>
1. Sekilas Sejarah Kelembagaan Bank Indonesia Periode 1959-1966	2
2. Struktur Direksi-Dewan Gubernur 1959-1966	4
3. BI dalam Bank Tunggal	7
4. Kantor Cabang Bank Indonesia	16
5. Sejarah Kelembagaan BI	25

## 1. Sekilas Sejarah Kelembagaan Bank Indonesia Periode 1959 - 1966



Pada periode 1959-1966, yang menjadi Gubernur BI adalah R. Soetikno Slamet, Soemarmo, T. Jusuf Muda Dalam, dan Radius Prawiro. Selama periode tersebut dilakukan pembukaan dan penutupan kantor cabang dan kantor perwakilan, yaitu pembukaan kantor cabang Bandar Lampung (2 Desember 1961), Biak (19 Februari 1963), Sorong (14 Maret 1963), Manokwari (17 Maret 1963), Merauke (19 Maret 1963), Tanjung Pinang (15 Oktober 1963), Banda Aceh (2 Maret 1964), Samarinda (10 November 1964), Pekanbaru (21 Desember 1964), Sabang (28 Desember 1964), dan Kupang (10 Februari 1965).

Kantor perwakilan yang dibuka yaitu kantor perwakilan Tokyo (13 Mei 1964), Kairo (21 Juni 1965), dan Meksiko (17 Februari 1966). Setelah itu, dilakukan penutupan 2 kantor perwakilan, yaitu Kairo dan Meksiko pada 13 Agustus 1966. Bank cabang Amsterdam ditutup pada 1 Juli 1965 dan statusnya berganti menjadi *De Indonesische Overzeese Bank N.V.* (Indover Bank), berdasarkan Surat Edaran (SE) Bank Negara Indonesia Unit I (BNI Unit I) No. 1/33 Rupa-Rupa tanggal 4 Desember 1965.

Modal perseroan terdiri atas saham-saham yang telah ditempatkan seluruhnya yang dimiliki oleh Bank Negara Indonesia (BNI) yang berkantor pusat di Jakarta. Adapun susunan pengurus terdiri atas: dewan komisaris, ketua yang dijabat oleh M. Djoeana Koesoemahardja, SH, dan sebagai wakil ketua adalah duta besar Sudjarwo Tjondronegoro, SH, sedang sekretaris dijabat oleh Drs. A. Oudt. Dewan direksi terdiri atas R.B. Gandasoebrata, SH sebagai direktur, dan Yhr. Mr. E.R.D. Elias sebagai direktur pengganti.

Pada tanggal 4 Juni 1965 keluar Penetapan Presiden No. 8 tahun 1965. Dalam Penetapan Presiden (Penpres) tersebut ditetapkan bahwa semua bank-bank umum negara dan Bank Tabungan Negara (BTN) diintegrasikan ke dalam bank sentral dalam sistem baru bernama bank tunggal. Langkah ini diambil untuk menyederhanakan struktur dan organisasi yang bersifat tunggal.

Sebagai tindak lanjut dari penpres tersebut, pada tanggal 21 Juni 1965, pemerintah mengeluarkan pula Penpres No. 9, 11, dan 13 tahun 1965. Dalam ketiga penpres tersebut, berturut-turut Bank Koperasi Tani dan Nelayan (BKTN), Bank Umum Negara (BUNEG), dan Bank Tabungan Negara (BTN) diintegrasikan ke dalam Bank Indonesia.

Pada tanggal 30 Juli 1965, keluar Penpres No. 17 tahun 1965 tentang pendirian bank tunggal milik negara dengan nama Bank Negara Indonesia (BNI). Mulai tanggal 17 Agustus 1965, kantor BI, BKTN, BNI, BUNEG, dan BTN dilebur ke dalam BNI, masing-masing beroperasi dengan nama BNI Unit I, Unit II, Unit III, Unit IV, dan Unit V.

Menurut Surat Keputusan Menteri Urusan Bank Sentral (MUBS) No. 72/UBS/65 tanggal 19 Agustus 1965, salah satu tujuan bank tunggal adalah mengantarkan

jasa-jasa bank dengan segala cara dan daya sampai ke pelosok-pelosok. Maksudnya adalah supaya lebih mengintegrasikan diri dengan masyarakat dan aktif dalam memberikan potensi rakyat.

Tidak semua pihak setuju terhadap kebijakan itu. Direktur Utama Bank Dagang Negara (BDN), J.D. Massie, yang juga Menteri Urusan Penertiban Bank dan Modal Swasta (MUPBMS) tidak sependapat terhadap diberlakukannya kebijakan unifikasi bank ini. Alasannya, pengintegrasian bank-bank ke dalam bank tunggal (BNI) ini malah akan membingungkan para koresponden di luar negeri.

Struktur organisasi bank tunggal dalam masa peralihan per tanggal 17 Agustus 1965 terdiri atas 14 urusan dan 1 biro. Masing-masing adalah biro menteri, urusan pencetakan dan pengedaran uang, urusan pengerahan dana dan jasa-jasa, urusan kredit pertanian dan perikanan, urusan kredit perkebunan dan kehutanan, urusan kredit perindustrian dan pertambangan, urusan kredit perdagangan, urusan kredit prasarana, urusan penyertaan, urusan hubungan lalu-lintas pembayaran luar negeri, urusan pengawasan dan administrasi, urusan pembimbingan/pengawasan perbankan, urusan riset, perencanaan, pengembangan, urusan personalia dan pendidikan serta urusan logistik.

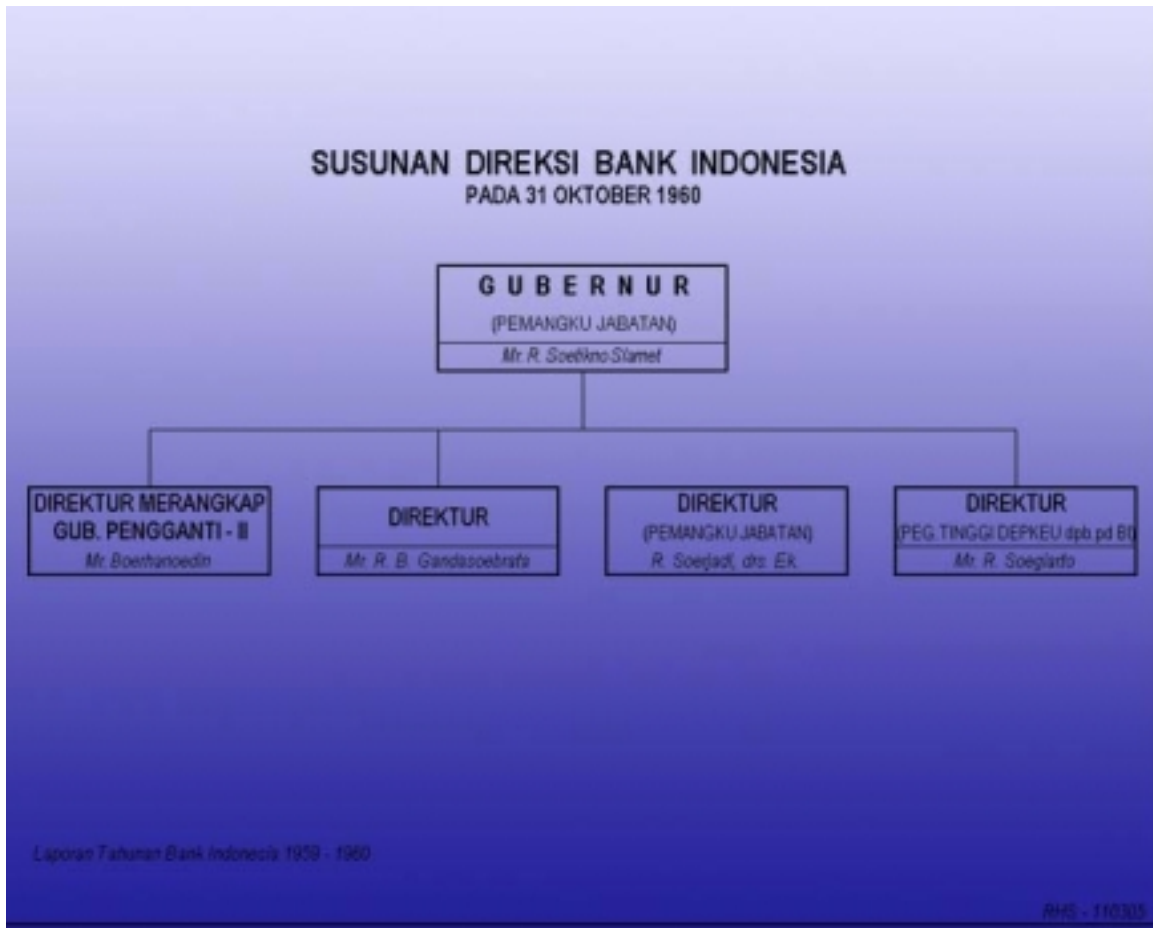
Pada tanggal 27 Maret 1966, Drs. Radius Prawiro diangkat menjadi Gubernur BNI Unit I, menggantikan Menteri Urusan Bank Sentral T. Jusuf Muda Dalam. Akibat penggantian tersebut, struktur organisasi mengalami perubahan. Jumlah unit kerja dikurangi dari 14 urusan dan 1 biro menjadi 6 urusan dan 1 biro dengan 36 bagian. Masing-masing adalah biro menteri (4 bagian), urusan luar negeri (7 bagian), urusan administrasi, organisasi dan pengawasan (6 bagian), urusan pengadaan uang dan pencetakan uang (4 bagian), urusan perbankan dan pembimbingan (4 bagian), dan urusan umum (6 bagian).

## 2. Struktur Direksi-Dewan Gubernur 1959-1966

Struktur Organisasi yang ditampilkan adalah struktur organisasi yang mencerminkan keadaan pada tanggal yang bersangkutan. Pada periode 1959-1966 terjadi beberapa kali perubahan. Tanggal 31 Juli 1959 Bank Indonesia dipimpin oleh Mr. Loekman Hakim yang dibantu oleh Mr. Indra Kasoema, Mr. Boerhanoedin dan Mr. R.B. Ganasoebrata. Sedangkan pada tanggal 31 Oktober 1960, kepemimpinan Bank Indonesia dijabat oleh Mr. R. Soetikno Slamet dan dibantu oleh 4 orang direksi yaitu; Mr. Boerhanoedin, Mr. R.B. Ganasoebrata, R. Soerjadi, Drs. Ek, dan Mr. R. Soegiarto. Dalam tahun 1962 dengan keluarnya Keputusan Presiden No.91/1962 terjadi perubahan struktural Kabinet bidang keuangan, antara lain penonaktifan Dewan Moneter dan diangkatnya Gubernur Bank Indonesia sebagai Menteri Urusan Bank Sentral.

### SUSUNAN DIREKSI BANK INDONESIA PADA 31 JULI 1959





**PERUBAHAN STRUKTUR KABINET - MENTERI URUSAN BANK SENTRAL  
PADA AKHIR TAHUN 1962**

**CATATAN ATAS LAPORAN TAHUNAN 1960 - 1965**

Masa antara 1960 - 1965 tidak diterbitkan Laporan Tahunan dan baru diterbitkan pada tanggal 1 Mei 1968 berupa gabungan laporan tahunan masa 1960 - 1965 dengan penjelasan Gubernur yang antara lain dapat dikutip sebagai berikut.

Laporan Tahunan terakhir adalah dari Tahun 1959 - 1960 karena kemudian terbit Surat Keputusan Menteri Keuangan No.UM/1961 tanggal 6 Januari 1961 tentang larangan menerbitkan laporan keuangan dsb. Larangan ini baru dicabut pada 28 Desember 1966 dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan No.D. 15. 1. 1. 37 sehingga laporan tahunan baru dibuat pada 1 Mei 1968 berupa laporan gabungan meliputi tahun-tahun 1960-1965.

Dengan banyaknya perubahan-perubahan selama itu terutama bidang organisasi dan personalia maka tidak dapat dilaporkan perkembangannya.

**TENTANG PE-NDN-AKTIVAN LEMBAGA DEWAN MONETER**

Dalam tahun 1962 dengan keluarnya Keputusan Presiden No.91/1962 terjadi perubahan struktural Kabinet bidang keuangan a.l. Departemen Urusan Bank Sentral (Bank Indonesia) dan diangkatnya Gubernur Bank Indonesia sebagai Menteri Urusan Bank Sentral. Dengan adanya perubahan struktural tersebut maka institut Dewan Moneter dinon-aktifkan dan segala wewenangnya pindah ke Kabinet.

\*\*\*\*\*

Laporan Tahunan Bank Negara Indonesia Unit I Tahun 1960 - 1965

RHS - 130305

### 3. BI dalam Bank Tunggal

Pembentukan Bank Tunggal merupakan kebijakan yang paling berpengaruh bagi dunia perbankan dalam masa Demokrasi Terpimpin. Meski Bank Tunggal baru terbentuk pada 1965, tapi sesungguhnya proses pembentukannya telah dimulai sejak 1959. Pada periode ini Bank Indonesia beberapa kali melakukan reorganisasi internal, yaitu pada 1960, 1962, 1964 dan 1965 menjelang pembentukan Bank Tunggal. Reorganisasi dilaksanakan untuk menyesuaikan posisi BI terhadap kebijakan pemerintah dalam sistem terpimpin yang berlandaskan Manipol/Usdek dan Dekon 1963. Sebagai realisasi dari Doktrin Bank Berdjoang pada 1964, Bank Indonesia diberi tugas untuk melayani secara langsung beberapa bidang usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah. Selanjutnya dalam struktur Bank Tunggal, Bank Indonesia beroperasi dengan nama Bank Negara Indonesia Unit I dan tetap berfungsi sebagai Bank Sentral sebagaimana Bank Indonesia sebelumnya.

*Dekret Presiden, yang telah mengembalikan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 menjadi undang-undang dasar negara, memberikan kewenangan besar kepada presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Dalam realisasinya, Presiden Soekarno menggunakan kewenangan itu untuk mengubah sistem demokrasi dan ekonomi Indonesia menjadi sistem demokrasi dan ekonomi terpimpin. Salah satu kebijakan kontroversial dalam sistem ini adalah pembentukan Bank Tunggal dengan nama Bank Negara Indonesia (BNI).*

*Pada artikel ini akan dikupas mengenai perjalanan panjang proses pembentukan Bank Tunggal, yang dimulai dari usaha penggoyahan independensi Bank Indonesia, hingga beberapa kali pelaksanaan reorganisasi di tubuh Bank Indonesia. Reorganisasi ini dilakukan seiring dengan dinamika tugas dan fungsi Bank Indonesia sebagai bank sentral pada masa ekonomi terpimpin.*

Pada masa demokrasi terpimpin, sering terjadi perubahan institusional yang menyebabkan departemen-departemen pemerintah atau lembaga-lembaga lainnya mengalami kesulitan untuk menyesuaikan diri. Kesulitan yang sama juga dialami oleh perusahaan-perusahaan negara dan swasta yang bergerak dalam segala sektor, termasuk sektor perbankan. Di antara sekian banyak kebijakan dalam sistem terpimpin yang cukup berpengaruh bagi perbankan, khususnya Bank Indonesia (BI) sebagai bank sentral, adalah pembentukan bank tunggal. Proses pembentukan bank tunggal tersebut secara bertahap telah dimulai sejak tahun 1959 sampai kemudian terlaksana pada pertengahan tahun 1965.

#### Independensi Bank Indonesia dalam Sistem Ekonomi Terpimpin

Pada tanggal 15 Agustus 1959, terbentuklah Dewan Perancang Nasional (Depernas) yang dipimpin oleh Mr. Muh. Yamin sebagai Wakil Menteri Pertama. Dewan ini beranggotakan 80 orang wakil golongan masyarakat dan daerah. Kemudian, pada tanggal 26 Juli 1960, dewan ini berhasil menyusun suatu Rancangan Dasar Undang-Undang Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahapan Tahun 1961–1969. Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) menyetujui rancangan tersebut dan ditetapkan sebagai TAP No. II/MPRS/1960. Berkaitan dengan itu, melalui

Penetapan Presiden (Penpres) No. 6 tahun 1960, BI diwajibkan menyesuaikan tugas dan kebijakan tata kerjanya dengan:

1. Amanat Presiden tentang Pembangunan Semesta Berencana yang diucapkan pada Sidang Pleno Depernas 28 Agustus 1959
2. TAP No. II/MPRS/1960 tentang Garis-Garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahapan Pertama 1961–1969

Dalam pelaksanaan penyesuaian tugas dan tata kerja tersebut, Menteri Keuangan dengan persetujuan Menteri Pertama diberi wewenang untuk menetapkan kebijakan serta mengambil tindakan menyimpang dari Undang-Undang (UU) No. 11/1953 bila dianggap perlu.

Sejak dikeluarkannya Penpres No. 6/1960, Independensi BI mulai goyah. Hal ini disebabkan oleh kuatnya intervensi pemerintah dalam tugas dan tata kerja BI sebagai bank sentral. Hal itu semakin menguat ketika terjadi *regrouping* Kabinet Kerja II melalui Keputusan Presiden No. 94/1962. Sesuai dengan hasil *regrouping*, pada Kabinet Kerja III (6 Maret 1962-13 Nopember 1963), bidang keuangan dipimpin oleh seorang Wakil Perdana Menteri (Wampa) yang meliputi tiga urusan, yaitu: urusan pendapatan, pembiayaan, dan pengawasan, urusan anggaran negara, serta urusan bank sentral. Gubernur BI (bank sentral), yang pada saat itu dijabat oleh Mr. Soemarno, diangkat kedudukannya menjadi Menteri Urusan Bank Sentral (MUBS). Menteri ini menggunakan aparatur BI. Hal itu mengakibatkan dewan moneter dinonaktifkan dan segala wewenangnya untuk menentukan kebijakan moneter beralih ke kabinet.

Kedudukan BI juga berubah. BI telah menjadi bagian dari aparat pemerintah, yaitu sebagai pelaksana dalam bidang keuangan. Masuknya BI dalam kabinet menyebabkan posisinya berada dalam kendali presiden dan kedudukannya semakin tidak independen. Sementara itu, dalam UU No. 11/1953, pemisahan kewenangan antara BI dan pemerintah di bidang keuangan dan moneter juga belum diatur secara jelas.

Pada tahun 1963, *regrouping* terhadap Kabinet Kerja kembali dilakukan untuk kedua kalinya. Berdasarkan Keputusan Presiden No. 232 tanggal 13 Nopember 1963, dilakukan *regrouping* untuk menjamin pelaksanaan program kabinet yang ditekankan pada perjuangan anti imperialisme dan kolonialisme. *Regrouping* ini menentukan bidang keuangan kabinet diubah menjadi kompartemen keuangan serta menambahkan seorang menteri, yaitu Menteri Urusan Penertiban Bank dan Modal Swasta (MUPBMS). Menteri tersebut juga menggunakan BI sebagai aparaturnya. BI juga dijadikan sebagai penghubung antara menteri dengan seluruh bank-bank swasta. Dengan demikian, dalam periode demokrasi terpimpin ini, BI digunakan oleh dua kementerian sekaligus, yaitu urusan bank sentral dan urusan penertiban bank dan modal swasta.

## Reorganisasi Bank Indonesia dalam Sistem Ekonomi Terpimpin

### Reorganisasi 1960

Untuk menyelaraskan tugas-tugas Bank Indonesia sebagai bank sentral dalam rangka pelaksanaan program umum negara dalam bidang ekonomi dan keuangan, maka secara internal pada 1960 dilakukan reorganisasi Bank Indonesia. Reorganisasi ini sebenarnya telah dipersiapkan sejak periode kepemimpinan Mr. Loekman Hakim.



Tetapi karena berbagai gejolak politik, reorganisasi baru bisa dilaksanakan pada 1960. Melalui reorganisasi tersebut diciptakan unit kerja tingkat Urusan yang membawahi beberapa Bagian. Hal itu merupakan penyesuaian terhadap prinsip kekeluargaan dan gotong royong yang dianut oleh demokrasi terpimpin dan menekankan strategi bank dalam membangun dan mengembangkan ekonomi. Pada saat itu sebagai bank sentral, Bank Indonesia juga berperan sebagai agen pemerintah dan agen pembangunan. Untuk itu dibentuk 5 (lima) urusan yang meliputi :

- Urusan Umum
- Urusan Pembangunan Ekonomi
- Urusan Research, Ekonomi dan Statistik
- Urusan Moneter
- Urusan Luar Negeri

Tiap urusan dipimpin dan dikoordinir oleh seorang direktur yang dalam pelaksanaan hariannya dibantu oleh seorang direktur muda sebagai pengendali dan pengawas jalannya kebijakan. Direktur muda tersebut membawahi Bagian yang secara keseluruhan berjumlah 21 Bagian. Berikut susunan direksi Bank Indonesia pada masa reorganisasi 1960 tersebut :

- Pemangku Jabatan Gubernur: Soetikno Slamet, S.H.
- Gubernur Pengganti I/Direktur Ur. Moneter: Indra Kasoema, S.H.
- Direktur Urusan Umum : Boerhannoedin, S.H.
- Direktur Urusan Luar Negeri: R.B. Gandasoebrota
- Dir. Ur. Pemb. Ekonomi, Research & Stast.: Soerjadi, S.E.

Direktur Muda Urusan Umum terdiri dari:

- Inspr./Dir.Muda Pengawasan Pbkkan & Adm. Pusat : Tan Liang Oen
- Dir. Muda Kas, UKB & Umum/Sekretariat : Hertatijanto, S.H.
- Direktur Muda Urusan Moneter : M. Djoeana Koesoemahardja, S.H.
- Direktur Muda Urusan Luar Negeri : Oey Beng To, S.E.

### Reorganisasi 1962

Soetikno Slamet hanya memimpin Bank Indonesia selama satu tahun (1959-1960). Pada periode berikutnya (1960-1963), Bank Indonesia dipimpin oleh Soemarno, S.H. dengan dibantu oleh Byanti Kharmawan (sebelumnya bernama Khouw Bian Tie, S.E.) sebagai Gubernur Pengganti II bersama dengan R. Hertatijanto dan M. Djoeana Koesoemahardja sebagai Direktur.

Pada masa kepemimpinan Gubernur Soemarno telah dibentuk Dewan Pembantu Pimpinan Bank Indonesia pada tanggal 20 Mei 1961. Dewan tersebut dimaksudkan sebagai aparat pembantu Direksi yang langsung dipimpin oleh Gubernur. Pada mulanya tugas Dewan adalah membantu Pimpinan Bank dengan cara mengajukan usulan, saran dan pendapat dalam menyelesaikan segala persoalan. Tapi kemudian tugas Dewan disempurnakan dengan tugas baru untuk memelihara ketertiban internal bank.

Dengan beberapa pengalaman baru yang ditemukan selama masa 1960-1961, Bank Indonesia kembali melakukan reorganisasi dengan tujuan untuk menangani secara lebih serius hal-hal berikut:

1. Penyediaan uang kertas yang terus meningkat jumlahnya terutama setelah Tindakan Moneter Agustus 1959. Jumlah uang kartal yang beredar hingga akhir Desember 1959 mencapai jumlah Rp 26.383,1 juta.

2. Pemberian kredit kepada perusahaan dan yayasan pemerintah yang terus meningkat selama 1960.
3. Kaderisasi tenaga pimpinan dalam dunia perbankan, khususnya Bank Indonesia memerlukan perhatian dalam meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masalah perbankan di Indonesia.

Maka pada awal 1962, Bank Indonesia kembali melakukan reorganisasi yang meliputi :

1. Pembentukan Urusan Pengedaran Uang Kertas; urusan Bank Indonesia yang semula berjumlah lima bertambah menjadi enam.
2. Pelaksanaan dan koordinasi; pelaksana dan koordinator harian dari Bagian-Bagian dilaksanakan oleh Direktur Pengganti, semula tugas tersebut dilaksanakan oleh Direktur Muda.
3. Penambahan Bagian dalam Urusan Umum, yaitu Bagian Pendidikan. Tambahan dalam Urusan Pembangunan Ekonomi, yaitu Bagian Asuransi Kredit.

Pemantapan dan perubahan Bagian Laporan yang terdapat dalam urusan *research*, ekonomi dan statistik sehingga menjadi bagian dokumentasi dan publikasi.

Reorganisasi tersebut bertitik tolak pada reorganisasi 1960 dan berdasarkan TAP MPRS No. 2/1959 demi tercapainya efisiensi yang lebih sempurna dalam melaksanakan tugas Bank Indonesia sebagai bank sentral.

#### Reorganisasi 1964

Pada tanggal 10 April 1964, Bank Indonesia kembali menyempurnakan organisasinya sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam sistem ekonomi terpimpin yang banyak diwarnai berbagai perombakan struktur dalam segala bidang termasuk perbankan. Dalam reorganisasi 1964 tersebut Bank Indonesia terdiri dari 11 Urusan yang membawahi 39 Bagian. Berikut rincian dari Urusan dan Bagian tersebut :

- Urusan *Research*
- Urusan Pembangunan Ekonomi
- Urusan Perencanaan Kredit
- Urusan Perkreditan
- Urusan LAAPLN
- Urusan Pembimbingan Bank-Bank
- Urusan Luar Negeri
- Urusan Umum
- Urusan Administrasi, Organisasi dan Inspeksi
- Urusan Pengedaran dan Pencetakan Uang
- Biro Direksi

#### Reorganisasi 1965

Struktur Organisasi yang dibentuk pada tahun 1964 tersebut tidak bertahan lama, karena setahun kemudian, yaitu menjelang integrasi bank-bank pada 1965, Bank Indonesia kembali mereorganisasi 11 urusannya hingga menjadi 9 (sembilan) urusan. Urusan-urusan tersebut adalah:

- Biro Menteri
- Urusan Luar Negeri
- Urusan Administrasi, Organisasi dan Pengawasan
- Urusan Pemberantasan dan Penyebaran Uang
- Urusan Perbankan /Pembimbingan

- Urusan Perkreditan
- Urusan Research
- Urusan Umum
- Urusan Penyertaan

Dalam reorganisasi 1965 tersebut, beberapa urusan dihapuskan, antara lain urusan pembangunan ekonomi dimasukkan dalam urusan pemberian kredit dan urusan Perbankan/Pembimbingan. Sedangkan urusan perencanaan kredit disempitkan menjadi bagian perencanaan kredit yang disubordinasikan kepada urusan perkreditan. Bidang perbankan yang semula diletakkan segi pengawasan perbankan, diubah menjadi pembimbingan. Dalam urusan umum ditambahkan bagian baru, yaitu bagian pengangkutan dan bagian pembinaan mental, dan bagian rumah tangga dirubah menjadi bagian peralatan. Kemudian dalam urusan *research* ditambahkan bagian pengerahan dana.

Sesuai dengan perkembangan politik dan meningkatnya hubungan ekonomi dan pembangunan dengan negara-negara Blok Timur dan Non Blok. Maka dalam urusan luar negeri mulai tampak adanya regionalisasi dengan penambahan Bagian Eropa Timur, Eropa Barat, Benua Amerika dan Bagian Asia, Afrika, Australia. Perubahan struktur pada 1965 tersebut merupakan langkah penyesuaian diri Bank Indonesia terhadap Doktrin Bank Berdjoang dan kebijakan yang terkandung dalam Deklarasi Ekonomi (DEKON) yang telah diumumkan pada tanggal 28 Maret 1963 oleh Soekarno.

Dengan demikian selama periode demokrasi dipimpin Bank Indonesia mengalami empat kali reorganisasi yaitu reorganisasi 1960, 1962, 1964 dan 1965. Reorganisasi tersebut antara lain disebabkan oleh tiga faktor berikut :

- Pertama, perkembangan volume pekerjaan bank yang semakin besar dan beraneka ragam sehingga diperlukan koordinasi melalui bagian-bagian baru.
- Kedua, proses penyesuaian diri dalam rangka menjalankan fungsi-fungsi bank sentral secara lebih luas antara lain sebagai *bankers bank* dan *lender of the last resort* serta meninggalkan fungsi komersial.
- Ketiga, perkembangan ekonomi periode 1959-1966 banyak dipengaruhi oleh perkembangan politik.

### Doktrin Bank Berdjoang dan Pembentukan Bank Tunggal

Menjelang pembentukan Bank Tunggal, pada 1964 dilaksanakan "Musyawarah Bank Berdjoang Sabang-Merauke" dengan tujuan untuk menyelaraskan antara tatanan ideal perbankan dengan tujuan dan cita-cita revolusi sebagaimana telah digariskan dalam Manipol dan DEKON. Musyawarah tersebut dihadiri oleh seluruh pemimpin cabang bank pemerintah seluruh Indonesia, termasuk Irian Barat, serta wakil-wakil perusahaan perbankan nasional swasta.

Dengan semangat gotong royong dan kekeluargaan musyawarah tersebut menghasilkan Doktrin Bank Berdjoang sebagai landasan bagi perbankan dalam menjalankan tugasnya pada masa penyelesaian revolusi. Inti dari doktrin tersebut adalah "Panca Sakti Bank Berdjoang" yang menegaskan bahwa bank adalah alat revolusi, bukan lembaga keuangan yang mencari keuntungan semata-mata.

Konsekuensi dari konsepsi Bank Berdjoang adalah penyesuaian tugas bank umum pemerintah agar dapat membantu pemerintah dalam menangani keadaan

perekonomian negara secara efisien. Untuk itu diadakan pembagian tugas di antara bank umum pemerintah dalam melayani sektor ekonomi tertentu. Pembagian tersebut merupakan langkah awal bagi spesialisasi bank dalam bidang usaha tertentu dan sekaligus bagian dari proses integrasi bank-bank.

Pada tanggal 11 April 1965, Presiden Soekarno dalam amanat politiknya di hadapan Sidang Umum MPRS menyatakan bahwa struktur perbankan Indonesia sebagai penyedia dana bagi proyek-proyek pemerintah, secara bertahap akan diarahkan kepada sistem Bank Tunggal. Dengan sistem tersebut kebijakan pemerintah di bidang moneter dan perbankan dapat dijalankan secara efektif, efisien dan dipimpin demi suksesnya pelaksanaan program perjuangan pemerintah.

Sebelum membentuk Bank Tunggal, pemerintah terlebih dahulu mengintegrasikan bank-bank umum dan bank tabungan milik pemerintah. Pengintegrasian tersebut dilaksanakan secara bertahap melalui Penetapan Presiden No. 8/1965 tanggal 4 Juni 1965. Pada tanggal yang sama dilakukan pengintegrasian Bank Koperasi Tani dan Nelayan ke dalam Bank Indonesia yang disusul kemudian pada 21 Juni 1965 dengan pengintegrasian Bank Umum Negara, Bank Tabungan Negara dan Bank Negara Indonesia kedalam Bank Indonesia.

Pembentukan Bank Tunggal baru dilaksanakan pada 27 Juli 1965 melalui Penetapan Presiden No. 17/1965 yang mengacu kepada UUD 1945 dan doktrin-doktrin Revolusi Indonesia. Bank tersebut bernama Bank Negara Indonesia dan merupakan bank milik negara yang menjalankan aktivitas bank sirkulasi, bank sentral dan bank umum. Selanjutnya melalui Surat Keputusan Menteri Urusan Bank Sentral No. 65/UBS/65 tanggal 30 Juli 1965 Bank Indonesia dileburkan kedalam Bank Negara Indonesia. Keputusan tersebut berlaku mulai 17 Agustus 1965.

### **Bank Indonesia dalam Sistem Bank Tunggal**

Dalam Sistem Bank Tunggal, bank-bank pemerintah termasuk Bank Indonesia beroperasi dengan nama Bank Negara Indonesia Unit. Bank Indonesia sebagai Unit I, Bank Koperasi, Tani dan Nelayan Unit II, Bank Negara Indonesia Unit III, Bank Umum Negara Unit IV dan Bank Tabungan Negara Unit V. Meski secara formal telah terintegrasi menjadi satu badan dalam bank tunggal, tapi dalam prakteknya bank-bank tersebut masih terbagi atas unit-unit yang mengerjakan tugasnya masing-masing sebagaimana halnya sebelum integrasi. Semua harapan dan rencana tersebut ternyata hanya bersifat teori karena tidak dapat terlaksana dengan baik.

Meskipun pada saat itu secara formal hanya terdapat tiga bank pemerintah di Indonesia, yaitu: Bank Negara Indonesia (Bank Tunggal), Bank Dagang Negara dan Bank Pembangunan Indonesia, tapi sebenarnya bank-bank pemerintah masih terdiri dari tujuh bank yaitu :

- Bank Indonesia (Bank Negara Indonesia Unit I)
- Bank Koperasi Tani dan Nelayan (Bank Negara Indonesia Unit II)
- Bank Negara Indonesia (Bank Negara Indonesia Unit III)
- Bank Umum Negara (Bank Negara Indonesia Unit IV)
- Bank Tabungan Negara (Bank Negara Indonesia Unit V)
- Bank Dagang Negara
- Bank Pembangunan Indonesia

Bank Indonesia dengan nama Bank Negara Indonesia Unit I masih tetap melakukan fungsinya sebagai bank sentral dan bank sirkulasi. Sebagaimana ditetapkan pada

1964, Bank Indonesia (BNI Unit I) pada masa Bank Tunggal melayani secara langsung beberapa bidang usaha dengan kriteria sebagai berikut.

1. Proyek-proyek Mandataris di luar anggaran pembangunan (APBN).
2. Usaha-usaha penting yang mendapat pembiayaan dari anggaran pembangunan, tetapi untuk sementara waktu belum mendapatkan pengesahan.
3. Perusahaan-perusahaan Negara yang memenuhi kebutuhan bagi kepentingan umum dan mengalami defisit karena tingginya biaya produksi. Dalam kasus semacam ini pemerintah memberikan subsidi kepada perusahaan tersebut agar mengurangi biaya yang ditanggung oleh bank.
4. Perusahaan-perusahaan vital dan perusahaan lainnya yang memerlukan biaya besar tetapi jangka waktu pembayaran kembalinya cukup lama, lebih dari tiga tahun. Proyek semacam ini khususnya terjadi di perusahaan pertambangan negara seperti pertambangan timah, minyak, batubara dan pertambangan umum seperti emas, nikel, bauksit, dll.
5. Kredit-kredit yang sifatnya perintisan (*pilot project*) yang umumnya kurang memenuhi persyaratan bank-teknis dan kredit-teknis namun penting secara sosial ekonomi.

Dengan mengacu kepada bidang-bidang usaha yang dilayani oleh Bank Indonesia tersebut, baru kemudian diadakan pembagian tugas di antara bank-bank pemerintah lainnya. Untuk melayani perusahaan-perusahaan dalam lingkungan departemen, baik dalam pendanaan maupun penerimaan simpanan.

Pada masa sistem terpimpin, bank-bank difungsikan sebagai alat revolusi yang berarti sebagai alat pemerintah, semua bank diarahkan menjadi semacam bank pembangunan yang mendanai proyek-proyek pemerintah. Demikian halnya dengan Bank Indonesia, peranannya sebagai pemberi kredit telah bergeser dari pemberian kredit kepada swasta pada dasawarsa 1950-an menjadi pemberi kredit kepada perusahaan-perusahaan negara dan proyek-proyek pemerintah.

Dalam sistem Bank Tunggal banyak ketentuan-ketentuan yang sulit untuk dilaksanakan secara teknis, maka hanya berlaku sebatas teori atau rencana saja tanpa pernah terlaksana. Contohnya sebagaimana dikemukakan dalam Penpres No. 16/1965, bahwa masing-masing Presiden Direktur dan para direktur bank yang diintegrasikan akan diperbantukan kepada pimpinan bank sentral dengan kedudukan masing-masing sebagai gubernur pengganti dan direktur. Tapi pada kenyataannya hal tersebut tidak pernah terwujud. Bahkan kantor pusat Bank Tunggal yang ditetapkan berada di kantor pusat Bank Negara Indonesia Unit I yaitu bekas kantor pusat Bank Indonesia tetap berfungsi seperti semula sebagai bank sentral dan bank sirkulasi.

Sebenarnya pada awal pembentukan Bank Tunggal telah ditetapkan Struktur Organisasi Bank Tunggal pada fase peralihan yang berlaku per 17 Agustus 1965. Tetapi struktur yang dihasilkan oleh Konferensi Dinas "Tujuan dan Struktur Organisasi Bank Tunggal" di Jakarta, 3 - 5 Agustus 1965 tersebut tidak pernah terlaksana. Dicantumkan dalam struktur tersebut bahwa Menteri Urusan Bank Sentral adalah pimpinan dari Bank Tunggal (Bank Negara Indonesia) padahal pada saat yang sama Menteri tersebut masih memimpin Bank Indonesia yang kemudian menjadi Bank Negara Indonesia Unit I bagian dari Bank Tunggal.

Sejauh ini hanya diketahui bahwa pada saat melebur dalam Bank Tunggal dan menjadi Bank Negara Indonesia Unit I, Bank Indonesia dipimpin oleh Jusuf Muda Dalam, Menteri Urusan Bank Sentral; para Gubernur Pengganti terdiri dari M. Djoeana Koesoemahardja S.H., R. Hertatijanto S.H., Brigjen. Soehardi dan Rachmat Saleh, S.E. sedangkan para Direktur terdiri dari R. Sulaksana Soeparto S.H., Oey Beng To S.E., S. Kertopati, R.A. Kartadjoemena S.H. dan Sulwan S. Astradiningrat. Demikian halnya dalam ketentuan landasan hukum Bank Tunggal, dalam pasal 4 Penpres No. 17/1965 menyatakan bahwa:

*Sampai ada ketentuan lebih lanjut, maka Undang-Undang Pokok Bank Indonesia 1953 (Undang-Undang No. 11 tahun 1953; Lembaran Negara tahun 1953 No. 40) dengan segala perubahan dan tambahannya pada dasarnya berlaku terhadap Bank Negara Indonesia termaksud dalam ayat (1) pasal 2 diatas.*

Hal tersebut sangat tidak mungkin dilaksanakan, mengingat segala keterbatasan Undang-Undang tersebut untuk mengatur berbagai jenis tugas bank-bank dalam Bank Tunggal. Secara implisit berarti Bank Tunggal dengan nama Bank Negara Indonesia adalah integrasi bank-bank pemerintah yang dipimpin oleh Bank Indonesia. Tetapi sebagaimana tercermin dalam ketetapan pelaksanaan Bank Tunggal, tidak ada sama sekali aturan yang mengacu kepada Undang-Undang Pokok Bank Indonesia tersebut.

Terhambatnya pelaksanaan Bank Tunggal tidak hanya disebabkan oleh ketidakjelasan konsep Bank Tunggal atau kerancuan teknis pelaksanaannya saja. Tetapi faktor perkembangan politik Indonesia yang semakin memanas pada 1965 juga turut berpengaruh. Peristiwa 30 September 1965 yang terjadi beberapa saat setelah dicanangkannya Bank Tunggal merupakan salah satu faktor politik yang paling berpengaruh dalam menghambat terlaksananya Bank Tunggal. Peristiwa berdarah yang melibatkan Partai Komunis Indonesia (PKI) tersebut kemudian memicu perubahan seluruh tatanan kehidupan sosial, ekonomi dan politik Indonesia. Bahkan Jusuf Muda Dalam sebagai pimpinan Bank Tunggal juga terlibat dalam peristiwa politik tersebut.

Peristiwa 30 September 1965 merupakan pemicu runtuhnya bangunan Sistem Terpimpin Soekarno yang kemudian diikuti dengan runtuhnya berbagai produk sistem lainnya, termasuk sistem Bank Tunggal. Pada periode setelah peristiwa tersebut telah diadakan berbagai perubahan fundamental baik dalam bidang politik maupun dalam bidang ekonomi. Dalam pasal 55 Ketetapan MPRS No. XXIII/MPRS/66 disebutkan bahwa dalam rangka pengamanan keuangan negara pada umumnya dan dalam rangka pengawasan dan penyehatan tata perbankan pada khususnya, maka harus segera ditetapkan Undang-Undang Pokok Perbankan dan Undang-Undang Bank Sentral. Sementara sambil menunggu disahkannya kedua undang-undang tersebut, pada 1966 telah ditetapkan bahwa Bank Negara Indonesia Unit I berfungsi kembali sebagai Bank Sentral, sedangkan unit-unit yang lain juga ditetapkan untuk menjalankan usahanya sebagaimana undang-undang pembentukannya terdahulu.

Sejak saat itu secara *de jure* keberadaan Bank Tunggal (Bank Negara Indonesia) masih tetap ada. Hanya saja secara *de facto* Bank Tunggal sudah tidak lagi berfungsi, hanya tinggal nama saja. Meskipun demikian Bank Indonesia tetap menggunakan nama Bank Negara Indonesia Unit I sampai akhirnya pada tanggal 31 Desember 1968 kembali menggunakan nama Bank Indonesia sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan No. Kep. 600/M/IV/12/1968 tanggal 18 Desember 1968.

*Bank Indonesia, yang telah diintegrasikan ke dalam Bank Tunggal dengan nama Bank Negara Indonesia Unit I, tetap melakukan tugasnya sebagai bank sentral. Pada sistem Bank Tunggal, banyak ketentuan yang sulit direalisasikan. Terhambatnya pelaksanaan Bank Tunggal ini disebabkan oleh ketidakjelasan konsep Bank Tunggal itu sendiri, serta munculnya peristiwa berdarah G30S/PKI, yang melibatkan pimpinan Bank Tunggal, Jusuf Muda Dalam.*

#### 4. Kantor Cabang Bank Indonesia

Kantor Bank Indonesia di tingkat cabang bertugas untuk menjalankan fungsi bank sentral di daerah-daerah. Pada saat disahkannya DJB menjadi Bank Indonesia pada 1 Juli 1953, bank mempunyai 15 kantor cabang di seluruh Indonesia, 1 (satu) cabang di Amsterdam dan 1 (satu) kantor perwakilan di New York. Pembukaan kantor Bank Indonesia pada periode Demokrasi Terpimpin banyak dipengaruhi oleh perkembangan politik yang tengah berlangsung. Masuknya Irian Barat ke wilayah RI, telah mendorong pembukaan kantor Bank Indonesia di beberapa kota di Irian untuk menggerakkan roda perekonomian wilayah tersebut. Sedangkan Konfrontasi Malaysia telah menyebabkan dibukanya Kantor Bank Indonesia di Kepulauan Riau dan Sabang. Bank Indonesia Kepulauan Riau bertugas melakukan dedolarisasi sedangkan Sabang bertugas untuk mendukung rencana pembukaan pelabuhan bebas Sabang. Selain faktor politik tersebut, pembukaan Kantor Bank Indonesia di tingkat cabang juga sesuai dengan rencana Bank Indonesia untuk membuka kantor secara merata di setiap daerah Propinsi.

*Dalam Undang-Undang (UU) No. 11 tahun 1953 pasal 3 ayat (2) dan (3) dinyatakan bahwa Bank Indonesia dapat mempunyai kantor-kantor cabang (agen) di Indonesia dan kantor-kantor perwakilan di luar negeri. Pada awal berdirinya, kantor cabang yang dimiliki Bank Indonesia merupakan Kantor Cabang De Javasche Bank (DJB) yang telah dinasionalisasi pada tahun 1951. Selanjutnya, Bank Indonesia membuka kantor cabang di beberapa daerah sesuai dengan kebutuhannya untuk menjalankan fungsi bank sentral di suatu daerah.*

*Pada artikel ini, akan dibahas mengenai pembukaan Kantor Cabang Bank Indonesia dalam kurun waktu 1953-1965, yang diawali dengan pembukaan Kantor Cabang Ambon, Maluku pada tahun 1956 dan Kantor Cabang Ampenan, Nusa Tenggara Barat pada tahun 1957.*

Pada 1951 pemerintah RI menasionalisasi De Javasche Bank (DJB) dan kemudian berdasarkan Undang-Undang No. 11 /1953 tentang Undang-Undang Pokok Bank Indonesia (UUPBI) ditetapkan sebagai bank sentral dengan nama Bank Indonesia. Sejak saat itu kantor-kantor cabang DJB menjadi kantor cabang Bank Indonesia. Kantor-kantor cabang tersebut meliputi :

1. Jawa : Bandung, Yogyakarta, Kediri, Malang, Semarang, Solo, Surabaya, Cirebon
2. Sumatera : Medan, Padang, Palembang
3. Kalimantan : Banjarmasin, Pontianak
4. Sulawesi : Makasar, Manado
5. Bank cabang Belanda dan perwakilan di New York

Dalam hal pembukaan kantor-kantor cabang tersebut, Undang Undang Pokok Bank Indonesia 1953 pasal 2 dan 3 telah menyatakan :



*(2) Bank mempunyai di Indonesia kantor-kantor agen, kantor-kantor koresponden dan jika perlu kantor-kantor agen besar, yang jumlahnya diatur menurut keperluan untuk menjalankan tugas Bank dengan semestinya.*

*(3) Bank dapat mempunyai di luar Indonesia satu atau lebih bank cabang atau kantor agen besar, begitu juga koresponden-koresponden dan wakil-wakil, sekadar hal itu dianggap perlu untuk menjalankan tugas Bank dengan semestinya.*

Pembukaan kantor cabang Bank Indonesia didasarkan pada kebutuhan untuk menjalankan fungsi bank sentral di suatu daerah. Maka dari itu cabang Bank Indonesia bertugas dalam pengaturan kredit dan dana perbankan di wilayah kerjanya, mengeluarkan dan mengedarkan uang kartal serta mengelola devisa dan lalu lintas pembayaran luar negeri. Sebagaimana Kantor Pusat Bank Indonesia, cabang Bank Indonesia juga bertugas memberi pelayanan perbankan kepada pemerintah daerah serta mengawasi dan membina pengembangan perbankan di wilayah kerjanya. Selain itu kegiatan utama cabang Bank Indonesia, antara lain adalah memberi saran kepada pemerintah daerah di wilayah kerjanya untuk hal-hal yang berkaitan dengan tujuan Bank Indonesia. Dengan adanya kantor-kantor cabang tersebut Bank Indonesia mampu mengadakan suatu penataan wilayah kerja yang penting dalam mewujudkan fungsinya dalam menjaga stabilitas mata uang, menyelenggarakan peredaran uang dan memajukan serta mengawasi kegiatan perbankan dan perkreditan yang dapat meliputi seluruh wilayah.

Sejak berdiri pada 1 Juli 1953, selama hampir tiga tahun BI tidak membuka kantor cabang baru selain meneruskan kantor cabang De Javasche Bank yang telah ada sebelumnya. Baru pada tahun 1956, BI memulai langkah memperluas jangkauan dengan membuka kantor cabang Ambon, Maluku pada 17 Maret 1956. Berikutnya pada 15 Agustus 1957 dibuka cabang baru di Ampenan, Nusa Tenggara Barat disusul dengan kantor cabang Jember, Jawa Timur pada 8 Februari 1958. Selain dua cabang tersebut, pada 1 Juli 1958 BI juga membuka kantor perwakilan di London, Inggris. Pada masa Demokrasi Parlementer ini Bank Indonesia tidak memperluas jaringan pelayanannya ke Sumatera, Sulawesi dan Kalimantan karena situasi politik dalam negeri, khususnya kondisi daerah (luar Jawa) sedang bergolak pada saat itu.

### **Pembukaan Kantor Cabang periode Demokrasi Terpimpin**

Pada periode Demokrasi Terpimpin, Bank Indonesia lebih banyak membuka kantor cabang di daerah sesuai dengan perkembangan politik yang sedang berlangsung saat itu. Cabang pertama yang dibuka pada masa ini adalah cabang Teluk Betung (Bandar Lampung) yaitu pada tanggal 2 Desember 1961. Sementara itu sarana yang tidak kalah pentingnya, yang dibangun pada masa itu adalah Gedung Kantor BI Pusat di Jl. Thamrin, Jakarta. Kantor tersebut mulai digunakan sejak 21 Maret 1963 meski peresmian baru dilaksanakan pada 5 Juli 1963 bertepatan dengan Hari Bank.

Dalam rentang waktu antara 1959 - 1966, tercatat 13 cabang baru telah dibuka di beberapa daerah di Irian Barat dan Sumatera. Lima cabang yang dibuka di Irian Barat yaitu cabang Kotabaru (Sukarnapura kemudian menjadi Jayapura), Biak, Sorong, Manokwari dan Merauke merupakan konsekuensi dari masuknya Irian Barat dalam bagian wilayah Republik Indonesia. Demikian pula dengan pembukaan cabang di wilayah kepulauan Riau, tidak terlepas dari sebab-akibat perkembangan politik masa Demokrasi Terpimpin.

## Pembukaan Kantor Cabang di Wilayah Irian Barat

Awal periode 1960-an merupakan puncak dari perjuangan merebut wilayah Irian Barat dari tangan Belanda. Pada 19 Desember 1961, dalam suatu rapat raksasa besar di Yogyakarta, Presiden Soekarno mencanangkan Tri Komando Rakyat (Trikorra). Trikorra tersebut berisikan tiga komando Presiden untuk rakyat Indonesia dalam rangka perjuangan merebut Irian Barat. Setelah dicanangkannya Trikorra, pada 2 Januari 1962 Presiden Soekarno selaku Panglima Tertinggi ABRI/Panglima Besar Komando Tertinggi Pembebasan Irian Barat mengeluarkan Keputusan no. 1/1962 untuk membentuk Komando Mandala Pembebasan Irian Barat.

Bank Indonesia terlibat secara langsung dalam pelaksanaan Trikorra tersebut dengan turut serta mengerahkan tenaga personelnya untuk membebaskan Irian Barat. Pada saat itu dibentuk Peleton Bank yang nantinya bertugas untuk membuka bank-bank pada lima kota di Irian Jaya, yaitu : Kotabaru, Biak, Manokwari, Sorong dan Merauke. Peleton bank tersebut beranggotakan Bank Indonesia, Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Koperasi Tani dan Nelayan (BKTN) urusan Exim, Bank Bumi Daya (BBD) dan Bank Dagang Negara (BDN). Berikut susunan dari pimpinan peleton tersebut :

- Komandan : E. Soekasah Somawidjaja
- Wk. Komandan : I Nyoman Moena
- Kom. Regu BI : Djoko Soetargo
- Kom. Regu BNI : Pamoedji
- Kom. Regu BKTN ur. Exim : Soemaryono
- Kom. Regu BBD : L.A. Wanget
- Kom. Regu BDN : Soegiyo Djoyosapetro

Sebelum berangkat ke Irian Barat, para personel Peleton Bank terlebih dahulu dilatih secara militer di Pusat Pendidikan Kesehatan Angkatan Darat di Kramat Jati. Hal itu dilakukan karena kemungkinan besar mereka akan melakukan pendaratan pertama di Irian Barat bersama dengan Induk Satuan Tempur dari pasukan RI. Persiapan tersebut merupakan hal yang berat bagi para pegawai bank yang tergabung dalam Peleton Bank, mengingat pelatihan yang mereka jalani adalah pelatihan perang, suatu hal yang tidak lazim mereka lakukan. Namun akhirnya, dari kelima regu yang disiapkan dalam Peleton Bank, hanya regu Bank Indonesia yang diberangkatkan, sedangkan regu bank-bank pemerintah lainnya batal untuk diberangkatkan sesuai dengan Keputusan Komando Tertinggi (Presiden).

Dalam melaksanakan Trikorra tersebut, E. Soekasah Somawidjaja, yang sebelumnya menjabat Komandan peleton Bank, diperbantukan kepada Komando Mandala yang dipimpin Mayjen. Soeharto sebagai Panglima Mandala. Sedangkan I Nyoman Moena diperbantukan pada *United Nations Temporary Executive Authority* (UNTEA) bersama-sama dengan Sjarief Soedomo. UNTEA adalah semacam pemerintahan transisi yang dibentuk oleh PBB, atas usul Ellsworth Bunker, Duta Besar Amerika Serikat, guna menengahi kebuntuan diplomasi antara Belanda dan Indonesia dalam masalah Irian Barat. UNTEA akan menerima penyerahan Irian Barat dari pihak Belanda yang selanjutnya akan diserahkan kepada pihak Indonesia sebelum 1 Mei 1963.

Akhirnya tugas untuk mempersiapkan pembukaan kantor-kantor cabang pada lima kota di Irian Barat diserahkan kepada Regu Bank Indonesia yang diberangkatkan pada Oktober 1962. Berikut susunan pimpinan regu tersebut:

- Pimpinan : Djoko Soetargo
- Staf/Pejabat : Ph. K. Intama, Moh. Sidik
- Staf/Calon Kuasa Kas : Saenan Soesanto, Soekanto
- Pegawai Tata Usaha : M. Koesnan Danoeatmodjo, Soenarto, K. R. Th. De Queljoe, Adnin, Soeratno
- Kasir : Kristiono, Lim Soen Kim, Dimin B. Tardjo, Ngafani B. Matkirom

Satu-satunya bank yang beroperasi di Irian Barat pada waktu itu adalah *Nederlandsche Handel Maatschappij* (NHM) yang kemudian diambil alih oleh Bank Indonesia pada 23 Maret 1963. Sebelumnya telah dibuka Bank Indonesia Cabang Kotabaru pada 13 Desember 1962, pada saat itu Irian Barat masih di bawah pengawasan UNTEA. Pembukaan cabang pertama di Irian Jaya tersebut dihadiri oleh Dr. Jalal Abdoh selaku Ketua UNTEA dan R. Soerjadi S.E. sebagai wakil dari Direksi Bank Indonesia. Berikut susunan sementara dari pimpinan Bank Indonesia cabang Kotabaru :

- Pemimpin Cabang : Djoko Soetargo (kemudian diganti oleh M. Rifa'i)
- Pemimpin Cabang Pengganti : Ph.K. Intama
- Staf/Calon Kuasa Kas : Soekanto, Saenan Soesanto
- Pemegang Buku : Mohammad Sidik

Masuknya Irian Barat secara resmi ke dalam wilayah kekuasaan RI ditetapkan melalui Penetapan Presiden No. 1 tahun 1963 tentang Pemerintahan di wilayah Irian Barat segera setelah diserahkan kepada RI. Penpres tersebut menetapkan pemerintahan Irian Barat Bentuk Baru yang akan menyelenggarakan pemerintahan di wilayah tersebut mulai 1 Mei 1963. Kemudian Penpres tentang pemerintahan tersebut disusul dengan Penetapan Presiden No. 2 tahun 1963 tentang Satuan Uang Rupiah yang khusus berlaku untuk Daerah Propinsi Irian Barat. Adapun peraturan-peraturan mengenai devisa ditetapkan tersendiri dalam Penetapan Presiden No. 3 tahun 1963 tentang peraturan-peraturan Devisen khusus untuk Daerah Propinsi Irian Barat.

Dalam pelaksanaan ketentuan Penpres no. 2/1963, Bank Indonesia ditunjuk sebagai pelaksana bersama dengan Menteri Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan. Dengan demikian yang melaksanakan tugas tersebut secara langsung adalah cabang-cabang Bank Indonesia di wilayah Irian Barat. Begitu juga dalam bidang devisa, cabang Bank Indonesia Kotabaru mewakili Lembaga Alat-Alat Pembayaran Luar Negeri (LAAPLN) dalam pelaksanaan peraturan-peraturan devisa di wilayah Irian Barat.

Setelah pembukaan kantor cabang pertama di Kotabaru pada akhir 1962, pada tahun berikutnya Bank Indonesia membuka empat kantor cabang baru di Irian Barat, sesuai dengan rencana sebelumnya. Pada 19 Februari 1963 dibuka kantor cabang Biak. Pendirian kantor ini terutama disebabkan oleh belum adanya hubungan udara secara langsung antara Jakarta dan Kotabaru. Sehingga kantor cabang Biak tersebut berfungsi sebagai penerima kiriman remise dari kantor pusat Bank Indonesia di Jakarta, baik dalam bentuk Rupiah Irian Barat maupun dalam Rupiah biasa. Untuk pertamakali Cabang Biak ini dipimpin oleh Mardjono sebagai Pemimpin Cabang

Pengganti yang kemudian *diganti oleh Gusti Abdul Aziz sebagai Pemimpin Cabang*, dan Sjarief Iksanoedin sebagai Kuasa Kas atau Pemegang Buku.

Pada bulan berikutnya Bank Indonesia membuka kantor cabang Sorong pada 14 Maret 1963, cabang Manokwari pada 17 Maret 1963 dan cabang Merauke pada 19 Maret 1963. Berikut susunan pimpinan dari masing-masing cabang tersebut pada saat pembukaannya :

#### Cabang Sorong

Pemimpin Cabang : F.H. Rarung

*(kemudian diganti oleh Rachmad sebagai Pemimpin Cabang sementara)*

Pemegang Buku Pembantu : M. Siahaan *(diganti oleh Djoko Soetrisno)*

#### Cabang Manokwari

Pemimpin Cabang : Mardjono *(sebagai Pejabat Pemimpin Cabang)*

*(kemudian diganti oleh Ph. K. Intama sebagai Pejabat Pemimpin Cabang, kemudian diangkat Mahfud Jakile sebagai Pemimpin Cabang)*

Pemegang Buku Pembantu : R. Mudomo *(diganti oleh R. Saptadi Baroto)*

#### Cabang Merauke

Pemimpin Cabang : R.H. Kamarga

*(kemudian diganti oleh Noek Hartono sebagai Pemimpin Cabang sementara)*

Pemegang Buku Pembantu : M. Boenjamin

*(kemudian diganti oleh R. Soenoekarto Darsopanambang)*

Dibukanya ketiga kantor cabang tersebut karena Bank Indonesia mempunyai kewajiban dalam meneruskan kegiatan dagang dari NHM yang telah beroperasi di Irian Barat sejak masa pemerintahan Kolonial Belanda. Sebelum membuka ketiganya, Bank Indonesia terlebih dahulu menyiapkan segala keperluan kantor sejak 15 Februari 1963. Dan pada minggu keempat bulan yang sama seluruh karyawan yang bertugas di ketiga kantor baru tersebut diberangkatkan ke Irian Barat.

Hingga masa 6,5 tahun sejak kembalinya Irian Barat ke pangkuan RI, Bank Indonesia tetap mempunyai lima kantor cabang di wilayah tersebut. Dan selama itu pula semua kantor cabang di Irian Barat juga menjalankan aktivitas komersial disamping melaksanakan fungsi bank sentral.

#### **Pembukaan Kantor Cabang di Wilayah Riau**

Sejak masa penjajahan Belanda hingga tahun 1960-an, Kepulauan Riau berada di luar wilayah pabean/moneter Indonesia. Mata uang yang berlaku sah di daerah tersebut adalah *Malayandollar*. Tidak masuknya daerah Kepulauan Riau dalam wilayah moneter Indonesia disebabkan oleh orientasi ekonomi daerah tersebut adalah wilayah pasar Singapura dan Malaya, karena secara geografis mereka berdekatan.

Akan tetapi menurut pertimbangan sosial, politik dan ekonomi, pemerintah RI menganggap perlunya memasukkan kembali wilayah Kepulauan Riau dalam wilayah moneter RI. Terlebih lagi setelah adanya rencana pembentukan Federasi Malaysia di daratan Malaya pada awal tahun 1963. Indonesia menganggap pembentukan Federasi Malaysia sebagai proyek *neokolonialisme* Inggris yang membahayakan bagi revolusi Indonesia. Maka dengan segera pemerintah RI melakukan blokade ekonomi di wilayah kepulauan Riau agar orientasi ekonominya berubah menjadi lebih erat hubungannya dengan ekonomi Indonesia. Tindakan blokade ekonomi tersebut, sekaligus merupakan kesempatan baik untuk mendedolarisasi wilayah Kepulauan Riau.

Pada 15 Oktober 1963 pemerintah RI mengundangkan Penetapan Presiden No. 9 tahun 1963 tentang Satuan Uang Rupiah yang khusus untuk Daerah Tingkat II Kepulauan Riau. Berdasarkan Penpres tersebut, Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan bersama Menteri Urusan Bank Sentral mengeluarkan Surat Keputusan Bersama pada 25 Oktober 1963 yang menyatakan penarikan semua jenis mata uang *Malayandollar* yang beredar di Kepulauan Riau sejak 1 Nopember 1963. Keputusan itu juga memutuskan bahwa mata uang tersebut tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah kecuali untuk penyetoran ke kas bank atau kas pemerintah.

Berkaitan dengan keinginan pemerintah untuk melakukan dedolarisasi atau pengrupiahan wilayah Kepulauan Riau, pada 15 Oktober 1963 Bank Indonesia membuka cabangnya di Tanjung Pinang, wilayah Kepulauan Riau. Pimpinan cabang baru tersebut adalah :

- Pemimpin Cabang : R.S Natalegawa
- Pemimpin Cabang Pengganti : Soekiyanto
- Kuasa Kas : A. Nelwan

Selain berfungsi menjalankan pengedaran uang sesuai dengan ketentuan Penpres No. 9/1963, Bank Indonesia cabang Tanjung Pinang juga berfungsi mewakili Lembaga Alat-Alat Pembayaran Luar Negeri (LAAPLN) dalam pelaksanaan peraturan-peraturan devisa di wilayah Kepulauan Riau. Sebagaimana Irian Barat, wilayah Kepulauan Riau juga mempunyai rezim devisa yang tersendiri. Hanya saja keadaan itu berubah dengan diundangkannya Penetapan Presiden No.3/1964 pada 27 Juni 1964 dan mulai berlaku pada 1 Juli 1964. Sejak saat itu rezim devisa yang berlaku di wilayah Kepulauan Riau dinyatakan berakhir dan diberlakukan aturan yang sama dengan wilayah Indonesia lainnya kecuali Irian Barat.

Terlepas dari tujuan politik pemerintah, pembukaan kantor cabang Tanjung Pinang tersebut juga sesuai dengan ketentuan yang menyatakan bahwa di setiap Daerah Swatantra Tingkat I (Propinsi) harus ada kantor cabang Bank Indonesia. Dan saat itu di Propinsi Riau sama sekali belum dibuka kantor cabang Bank Indonesia. Baru kemudian pada 21 Desember 1964 cabang Bank Indonesia dibuka di Pekanbaru, ibukota Propinsi Riau. Wilayah kerja cabang baru tersebut meliputi seluruh Propinsi Riau dengan pimpinan cabangnya yang pertama adalah A.U.Laoh.

Pada saat membuka kantor cabang Pekanbaru, Menteri Urusan Bank Sentral mengatakan bahwa Bank Indonesia Tanjung Pinang dalam waktu singkat telah mampu mengganti *Malayandollar* yang selama puluhan tahun telah menjadi satu-satunya alat pembayaran yang sah yang beredar di Kepulauan Riau. Selain itu

cabang Tanjung Pinang bersama-sama alat pemerintah yang lain dianggap telah berhasil memutuskan hubungan lalu-lintas perekonomian dengan wilayah Semenanjung Malaya yang dianggap sebagai proyek *neokolonialisme* pada saat itu. Dalam masa operasinya cabang Tanjung Pinang berhasil menjalin hubungan dengan berbagai pihak di wilayah tersebut, cabang tersebut berhasil menyalurkan dana perbankan untuk sarana kredit dan berbagai kegiatan produksi lainnya. Meskipun dianggap berhasil, cabang Tanjung Pinang akhirnya ditutup dan diintegrasikan dalam cabang Pekanbaru sejak 1 Maret 1965.

### Pembukaan Kantor Cabang dan Kantor Perwakilan di Wilayah Lainnya

Selain wilayah Irian Barat dan Riau, pada periode Demokrasi Terpimpin Bank Indonesia juga membuka beberapa cabang di wilayah lainnya. Pada masa tersebut dengan pertimbangan bahwa fungsi bank dalam pembangunan adalah sebagai pendorong kegiatan ekonomi daerah serta memberi bimbingan yang diperlukan bagi kegiatan ekonomi daerah, maka Bank Indonesia merencanakan pembukaan kantor cabang di tiap daerah Tingkat I.

Pada 2 Maret 1964 Bank Indonesia membuka cabang Banda Aceh dengan pertimbangan untuk memajukan perekonomian daerah Aceh yang secara geografis mempunyai arti penting dalam rangka melawan proyek *neokolonialisme* yaitu Malaysia. Berikutnya Bank Indonesia membuka satu kantor cabang di pulau Kalimantan, yaitu cabang Samarinda pada 10 Nopember 1964. Sebelumnya di pulau ini telah berdiri cabang Pontianak sejak 1906 dan cabang Banjarmasin sejak 1907.

Masih dalam tahun yang sama, Bank Indonesia membuka kantor cabang di daerah paling utara dari wilayah RI, yaitu kota Sabang di ujung pulau Sumatera. Kantor cabang Sabang secara resmi dibuka pada 28 Desember 1964. Pembukaan cabang di wilayah mempunyai arti yang sangat penting, mengingat secara geografis Sabang merupakan *crossroads* yang strategis antara Lautan Indonesia dan Lautan Pasifik. Dan lagi Sabang merupakan pelabuhan bebas yang mempunyai potensi untuk menyaingi pelabuhan Singapura dan Penang, Malaysia.

Pembukaan kantor Bank Indonesia cabang Sabang juga merupakan pelaksanaan atas Penetapan Presiden no. 10/1963 tentang Pelabuhan Bebas dan Wilayah Perdagangan Bebas dan Peraturan Presiden No. 22/1964 tentang Pelaksanaan pembangunan pelabuhan bebas (*free port*) Sabang. Pembangunan pelabuhan tersebut merupakan salah satu agenda dari konfrontasi terhadap Malaysia, khususnya dalam bidang ekonomi. Dalam kaitan itu, Bank Indonesia cabang Sabang turut berperan dalam mengembangkan pelabuhan bebas Sabang yang bertujuan untuk :

1. memperlancar perdagangan barang-barang ekspor Indonesia ke pasaran dunia
2. memperbesar volume perdagangan internasional negara Indonesia dengan menggunakan pelabuhan Sabang sebagai tempat untuk pengolahan yang meliputi proses *selecting*, *sorting* dan *upgrading* dari hasil-hasil ekspor Indonesia.

Berikutnya pada 12 Februari 1965 Bank Indonesia membuka satu cabang lagi di wilayah timur Indonesia yaitu cabang Kupang di kepulauan Timor. Pembukaan cabang ini dalam rangka pembukaan cabang-cabang Bank Indonesia di daerah-

daerah Tingkat I (propinsi) dan merupakan pembukaan yang terakhir kali dilakukan oleh Bank Indonesia sebelum terbentuknya Bank Tunggal pada 18 Agustus 1965.

Dalam perkembangan kantor perwakilan luar negeri, pada periode Demokrasi Terpimpin ini Bank Indonesia membuka kantor perwakilan Tokyo pada 13 Mei 1964 dan disusul dengan pembukaan kantor perwakilan Kairo pada 21 Juni 1965. Kantor perwakilan Kairo kemudian ditutup pada 13 Agustus 1966 berbarengan dengan penutupan perwakilan Meksiko yang telah dibuka sejak 17 Februari 1966. Sebelumnya, Bank Indonesia telah menutup bank cabang Amsterdam pada 1 Juli 1965 dan statusnya berganti menjadi *NV De Indonesische Overzeese Bank* (Indover Bank).

**Tabel Cabang/Perwakilan Bank Indonesia  
Periode 1953 - 1965**

No	Kantor Cabang	Dibuka	Ditutup	Dibuka Kembali	Keterangan
1	Semarang	1 Maret 1829	Pendudukan Jepang	25 Maret 1946	Eks cabang DJB
2	Surabaya	15 September 1829	Pendudukan Jepang	6 April 1946	Eks cabang DJB
3	Padang	29 Agustus 1864	Pendudukan Jepang	23 Oktober 1947	Eks cabang DJB
4	Makassar	21 Desember 1864	Pendudukan Jepang	20 September 1946	Eks cabang DJB
5	Cirebon	31 Juli 1866	Pendudukan Jepang	25 Agustus 1947	Eks cabang DJB
6	Solo	25 Nopember 1867	Pendudukan Jepang	5 Mei 1949	Eks cabang DJB
7	Yogyakarta	1 April 1879	Pendudukan Jepang	30 Desember 1948	Eks cabang DJB
			30 Juni 1949	22 Maret 1950	Kedua kalinya
8	Pontianak	1 April 1906	Pendudukan Jepang	1 Mei 1946	Eks cabang DJB
9	Medan	30 Juli 1907	Pendudukan Jepang	15 Mei 1946	Eks cabang DJB
10	Banjarmasin	1 Agustus 1907	Pendudukan Jepang	29 April 1946	Eks cabang DJB
11	Bandung	1 Juni 1906	Pendudukan Jepang	6 Mei 1946	Eks cabang DJB
12	Palembang	20 September 1909	Pendudukan Jepang	1 Agustus 1947	Eks cabang DJB
13	Menado	9 September 1910	Pendudukan Jepang	3 April 1946	Eks cabang DJB
14	Malang	1 Desember 1916	Pendudukan Jepang	15 September 1947	Eks cabang DJB
15	Kediri	2 Juli 1923	Pendudukan Jepang	17 Januari 1949	Eks cabang DJB
16	Ambon	17 Maret 1956			Masa Demokrasi Parleментар
17	Ampenan	15 Agustus 1957			Masa Demokrasi Parleментар
18	Jember	8 Februari 1958			Masa Demokrasi Parleментар
19	Teluk Betung	2 Desember 1961			Masa Demokrasi Terpimpin

20	Kotabaru	13 Desember 1962	Masa Demokrasi Terpimpin (Trihora)	
21	Biak	19 Februari 1963	Masa Demokrasi Terpimpin (Trihora)	
22	Sorong	14 Maret 1963	Masa Demokrasi Terpimpin (Trihora)	
23	Manokwari	17 Maret 1963	Masa Demokrasi Terpimpin (Trihora)	
24	Merauke	19 Maret 1963	Masa Demokrasi Terpimpin (Trihora)	
25	Jakarta (Thamrin)	5 Juli 1963	Kantor Pusat	
26	Tanjung Pinang	15 Nopember 1963	1 Maret 1965	Masuk wilayah KC Pekanbaru
27	Banda Aceh	2 Desember 1918	Pendudukan Jepang	2 Maret 1964 Eks cabang DJB
28	Samarinda	10 Nopember 1964	Masa Demokrasi Terpimpin	
29	Pekanbaru	21 Desember 1964	Masa Demokrasi Terpimpin	
30	Sabang	28 Desember 1964	Masa Demokrasi Terpimpin	
31	Kupang	10 Februari 1965	Masa Demokrasi Terpimpin	
No	Bank Cabang	Dibuka	Ditutup	Keterangan
1	Amsterdam	15 Mei 1891	1 Juli 1965	Berubah status NV Indover
No	Kantor Perwakilan	Dibuka	Keterangan	
1	New York	1 Agustus 1947	Eks Perwakilan DJB	
2	London	1 Juli 1958	Masa Demokrasi Parlemitter	
3	Tokyo	13 Mei 1964	Masa Demokrasi Terpimpin	
4	Kairo	21 Juni 1965	Masa Demokrasi Terpimpin	

*Selama hampir tiga tahun pertama sejak kelahirannya, Bank Indonesia tidak membuka kantor cabang baru. Baru pada tahun 1956, Bank Indonesia mulai membuka Kantor Cabang Ambon, Maluku. Selama kurun waktu 1953-1965, pembukaan Kantor Cabang Bank Indonesia di wilayah Irian Barat dan Riau merupakan catatan sejarah tersendiri. Hal tersebut disebabkan pada masa itu, di wilayah Irian Barat dan Riau, Indonesia tengah menghadapi konfrontasi dengan Belanda dan Malaysia. Pada akhir periode 1953-1965, Bank Indonesia telah memiliki 30 kantor cabang yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia dan 4 kantor perwakilan di luar negeri*



## 5. Sejarah Kelembagaan BI

Berdasarkan Keppres No.94 tahun 1962 tentang regrouping kabinet, ditetapkan bahwa Bidang Keuangan dipimpin oleh seorang Wakil Menteri Pertama yang membawahi 3 (tiga) Departemen, yaitu:

- 1) Departemen Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan,
- 2) Departemen Urusan Anggaran dan
- 3) Menteri Urusan Bank Sentral (MUBS)..

Berdasarkan Keppres No.94 tahun 1962 tentang regrouping kabinet, ditetapkan bahwa Bidang Keuangan dipimpin oleh seorang Wakil Menteri Pertama yang membawahi 3 (tiga) Departemen, yaitu:

- 1) Departemen Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan,
- 2) Departemen Urusan Anggaran dan
- 3) Menteri Urusan Bank Sentral (MUBS).

Dengan adanya perubahan tersebut, untuk pertama kalinya Gubernur BI memperoleh kedudukan setara dengan Menteri dengan sebutan Menteri Urusan Bank Sentral yang dijabat oleh Soemarno. Sebagai Menteri urusan Bank Sentral, Menteri ini tidak memiliki departemen, tetapi menggunakan aparat BI.

Dengan perubahan struktur tersebut, maka institusi Dewan Moneter dinonaktifkan. Dan segala wewenang Dewan Moneter pindah ke Kabinet. Untuk membantu menumbuhkan kegiatan ekonomi Irian Barat, BI berperan aktif dengan membuka kantor cabang di Jayapura pada tanggal 13 Desember 1962.

Tanggal 31 Desember 1962 bendera Indonesia mulai berkibar di samping bendera PBB. Tanggal 1 Mei 1963 dilakukan penyerahan kekuasaan pemerintahan atas Irian Barat dari *United Nations Temporary Executive Authority* (UNTEA) kepada Indonesia di Kotabaru yang sebelumnya bernama Hollandia. Sebagai bagian dari persetujuan tersebut, Indonesia menerima kewajiban untuk mengadakan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) di Irian Barat sebelum akhir 1969 dengan ketentuan bahwa kedua belah pihak akan menerima keputusan hasil pendapat rakyat Irian Barat tersebut. Di dalam UNTEA Bank Indonesia diwakili oleh Rachmat Saleh yang berperan aktif dalam tim ekonomi. Keppres No.232 tahun 1963 ditetapkan adanya tambahan seorang Menteri di bidang keuangan yaitu Menteri Urusan Penertiban Bank dan Modal Swasta (MUPBMS).

Dalam tahun 1963 BI mengakuisisi *De Nederlandsche Handels Maatschappij* (NHM) di daerah Irian Barat, termasuk cabang Kotabaru yang diintegrasikan ke dalam BI. Kantor-kantor NHM tersebut menjadi kantor cabang BI di Biak (19 Februari 1963), Sorong (14 Maret 1963), Manokwari (17 Maret 1963) dan Merauke (19 Maret 1963). Berdirinya 4 (empat) kantor cabang terakhir dilakukan dengan maksud untuk melanjutkan kegiatan NHM pada masa pemerintahan Belanda. Selama 6,5 (enam setengah) tahun sejak masuknya Irian Barat ke dalam wilayah RI, BI memiliki 5

(lima) kantor cabang di Irian Barat yang menjalankan aktivitas komersial di samping melaksanakan fungsi bank sentral. Pada periode ini juga, sesuai dengan Penetapan Presiden No.8 Tahun 1965, dilakukan pembentukan Bank Tunggal melalui penggabungan fungsi bank sirkulasi, bank sentral, dan bank umum dengan tujuan untuk terlaksananya kebijakan pemerintah di bidang moneter dan perbankan secara efektif, efisien, dan dipimpin.